

**Daftar Pejabat Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
(BPSI-UAT) Terkait LHKPN TA 2022**

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Dadang Sudarman, S.Kom.	Kasubag Tata Usaha
3	Asep Kurnia Saputra, S.I.Kom.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4	Hendi Maulana	Bendahara Pengeluaran
5	Enih Sukaenih, S.Sos.	Bendahara Penerimaan
6	Dr. Soni Sopiya	Pejabat Pengadaan



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI BASO LOMPENGENG ISHAK**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **449754**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **191.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **16.368.664**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **607.368.664**

III. HUTANG Rp. **---**

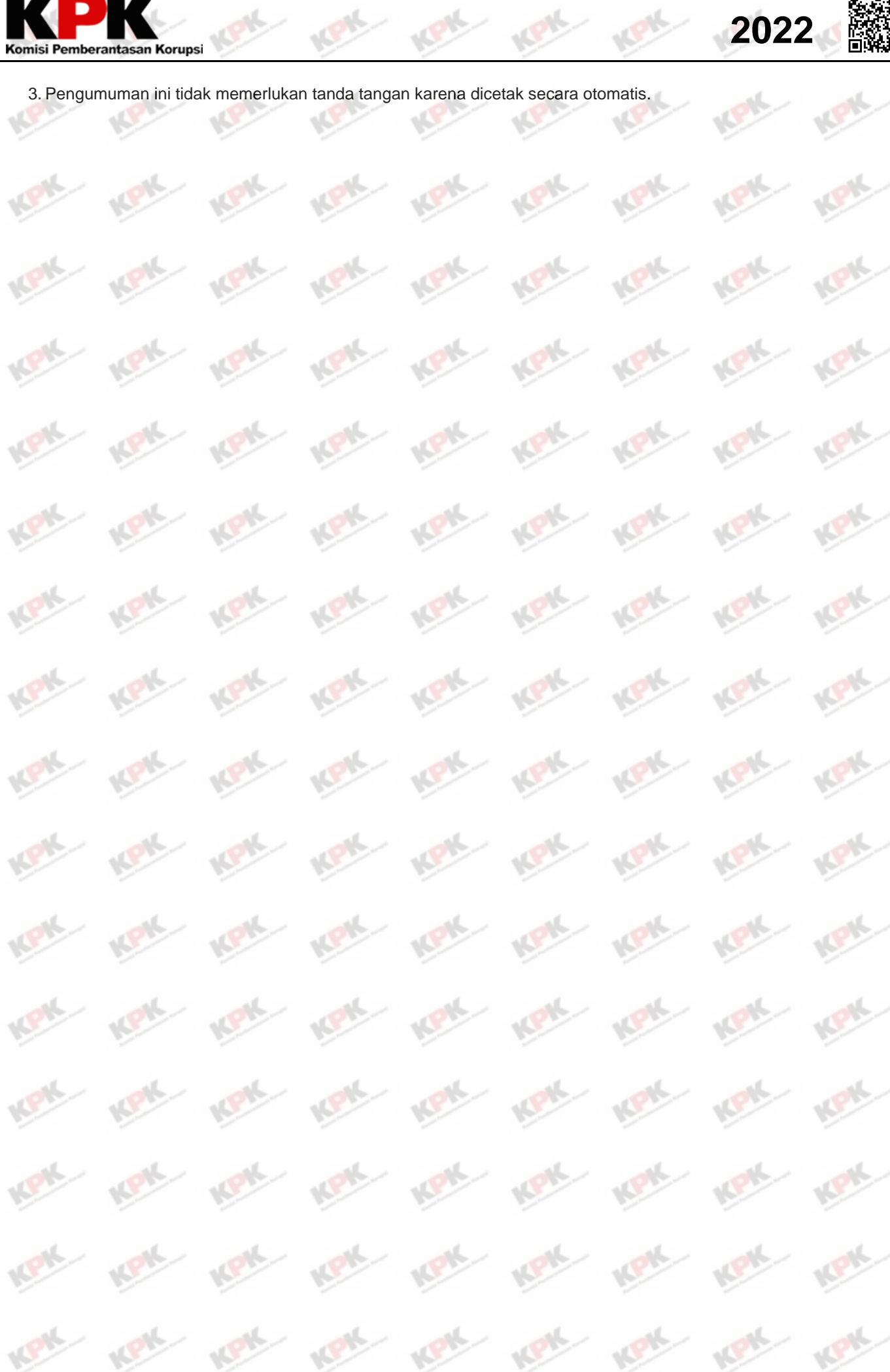
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **607.368.664**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DADANG SUDARMAN
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 464711

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	273.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/7 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 273.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.500.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	279.300.000
III. HUTANG	Rp.	13.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	266.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASEP KURNIA SAPUTRA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 226500

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	754.212.500
1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/75 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 558.112.500		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 196.100.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	8.460.000
1. MOTOR, HONDA VARIO/ E1F02N11M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.460.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.821.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.411.472
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	782.904.972

III. HUTANG Rp. 177.589.917

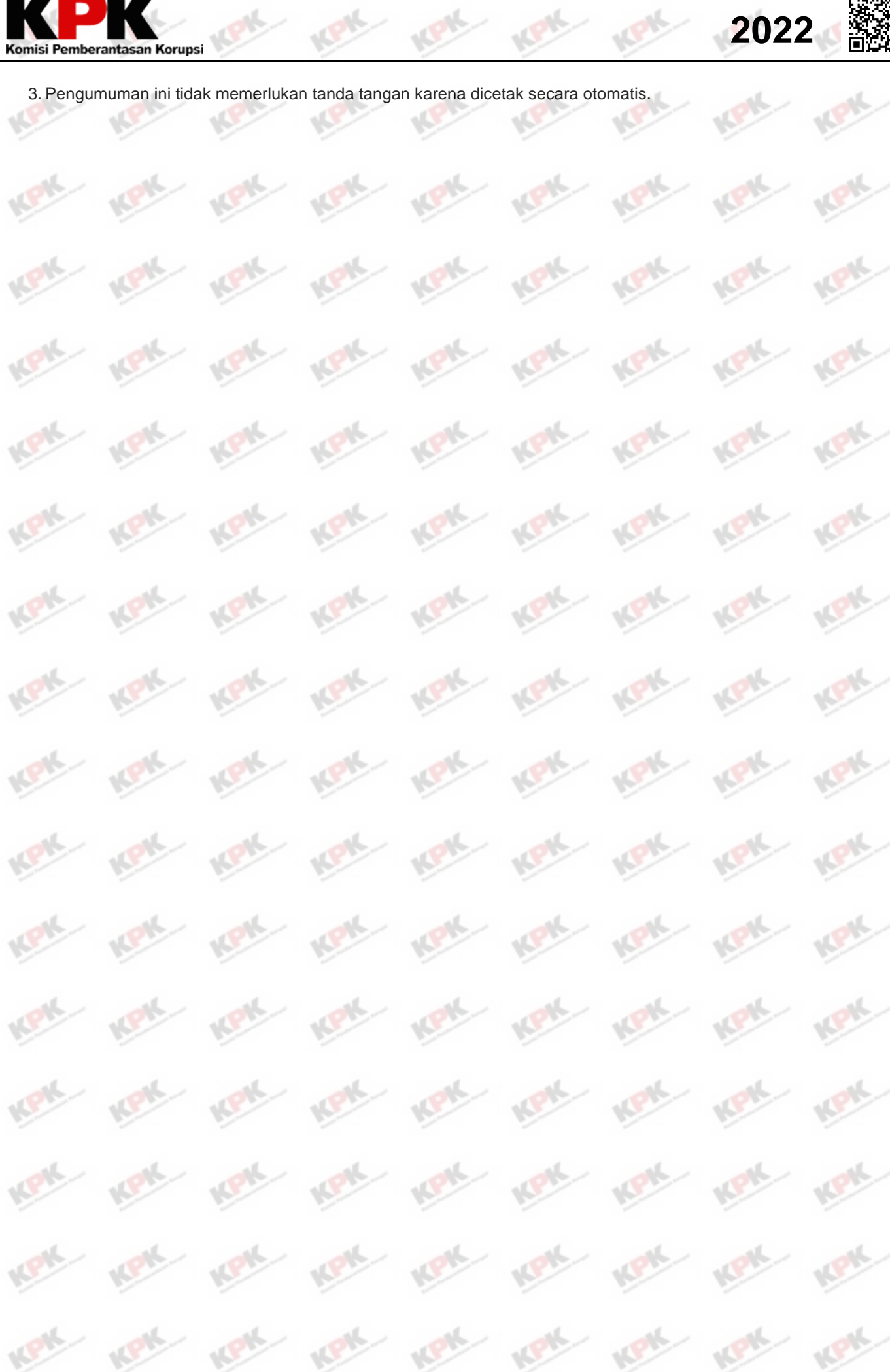
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 605.315.055

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDI MAULANA
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 635032

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/80 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m²/94 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA D1BO2N26L2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.827.196

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 234.827.196

III. HUTANG Rp. 181.467.000

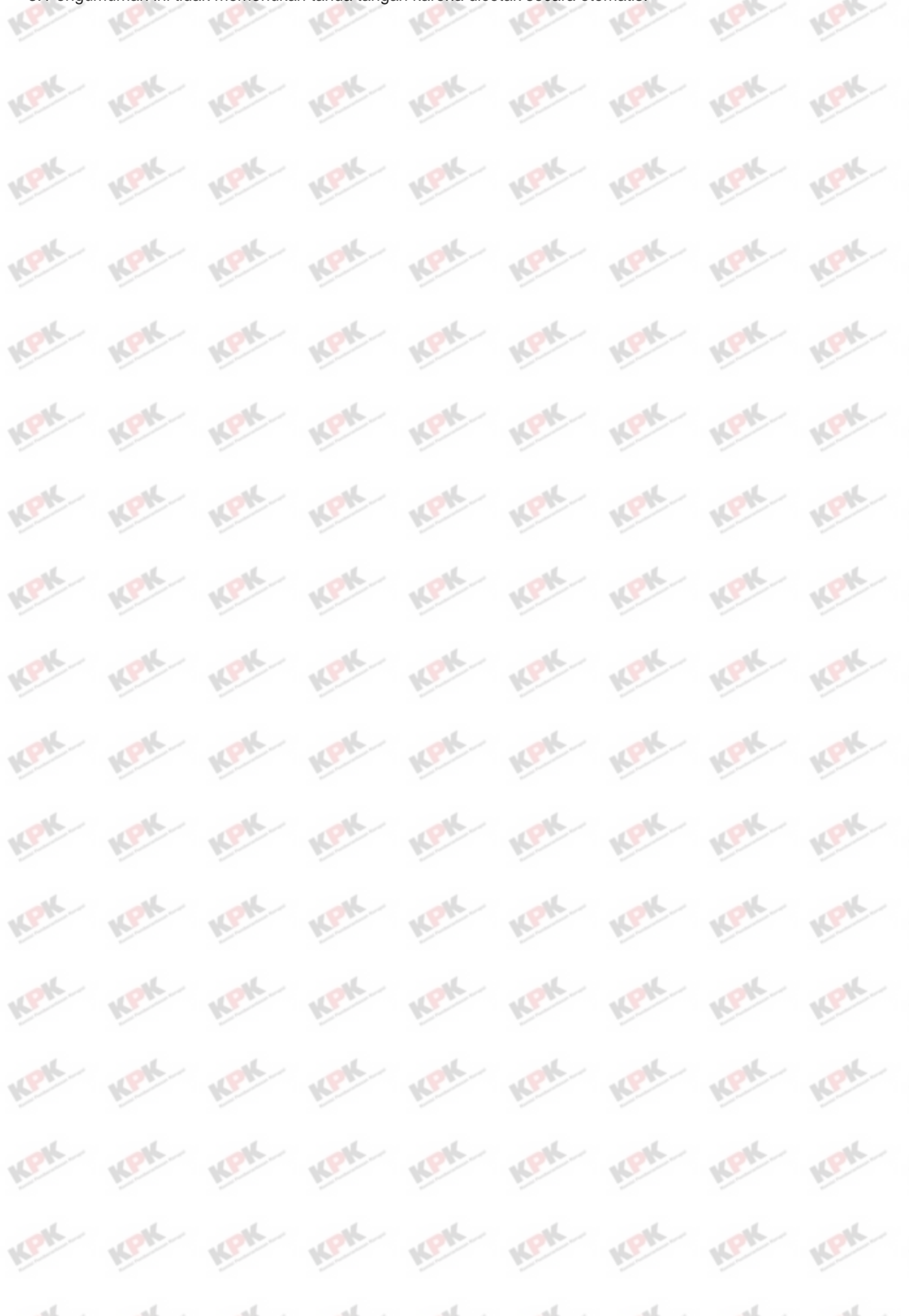
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 53.360.196

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENIH SUKAENIH
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 226503

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.745.334.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 878 m²/360 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.042.384.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1310 m²/420 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.626.000.000
3. Tanah Seluas 158 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 76.950.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 290.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI LIGHT TRUCK Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N-MAX 2020 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 88.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 156.825.479

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.280.159.479

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.280.159.479



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SONI SOPIYANA**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **134000**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 285.560.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/60 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 110.120.000
2. Tanah Seluas 3655 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 175.440.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 279.000.000

1. MOBIL, KIJANG INNOVA/2.0 G Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI BJ175B Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XRIDE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.305.711**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 578.365.711**III. HUTANG** Rp. 553.668.237**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 24.697.474

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.